

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI resmi dilantik pada senin, 21 Oktober 2024. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki beberapa kebijakan baru dan efisiensi kepada semua kementerian dan Lembaga negara pada 100 hari kerja pemerintahan mereka. Salah satu kementerian yang terkena dampak dari efisiensi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa kebijakan efisiensi merupakan pilihan yang tepat untuk menanggulangi ketidakpastian di tengah gejolak perekonomian yang sedang terjadi saat ini (Putra, 2025).

Pada era pemerintahan Joko Widodo, Anggaran untuk kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbutristek) relatif stabil atau bahkan mengalami peningkatan dengan di salurkannya dana bantuan sekolah atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke lebih banyak sekolah dan pembangunan yang lebih gencar terhadap infrastruktur sekolah. Selain itu, para guru dan tenaga Pendidikan juga mengikuti banyak pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka, setelah pemerintahan Joko Widodo berakhir, Presiden Prabowo memecah Kemenbutristek menjadi 3 kementerian termasuk Kemendikdasmen. Kementerian ini ikut terkena dampak dari kebijakan pemotongan atau penyesuaian anggaran Pemerintah (Putra, 2024).

Pemotongan anggaran efisiensi pada era presiden Prabowo – Gibran membuat cukup banyak situs media daring yang memuat berita tersebut terutama pada 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Keterlibatan warganet Indonesia dalam mengawal 100 hari kerja kepresidenan yang baru terlihat cukup signifikan. Terdapat animo yang tinggi dari warganet terhadap berita tersebut, yang tercermin dari banyaknya portal berita yang memberitakan dan warganet

memberikan berbagai respons di media sosial terhadap berita tersebut. Hal ini menunjukkan tingkat minat dan respons yang tinggi dari masyarakat terhadap konten berita tersebut.

Sumber : Olahan Peneliti

Kompas.com	Detik.com
Kemendikdasmen: PIP Tunjangan Guru Tidak Kena Efisiensi Anggaran	Kemendikdasmen Tegaskan PIP Tak Kena Efisiensi.
	

Tabel 1.1 Pemingkaian berita Kompas.com dan Detik.com

Kedua media tersebut memiliki judul yang hampir sama, pada artikel Kompas.com menyebutkan bahwa “Kemendikdasmen: PIP Tunjangan Guru Tidak Kena Efisiensi Anggaran”. Sedangkan Detik.com menyebutkan bahwa “Kemendikdasmen Tegaskan PIP Tak Kena Efisiensi.”. Pada judul berita tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pemingkaian berita. pada berita Kompas.com pemingkaian berita berfokus pada “Program Indonesia Pintar (PIP) tunjangan guru non -ASN, dipastikan tidak terkena efisiensi anggaran” hanya berfokus pada PIP tunjangan guru tidak terkena efisiensi anggaran saja sedangkan Detik.com tidak hanya berfokus pada anggaran PIP yang tak kena efisiensi saja tetapi juga menjelaskan target yang ingin disamakan oleh Kemendikdasmen pada tahun tahun berikutnya.

Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran isu efisiensi anggaran sudah di sampaikan pada Sidang perdana Kabinet pada Rabu 23 Oktober 2024 Presiden Prabowo menyoroti tentang pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara (Humas,2024). Pada sidang Kabinet Rabu 6 Novemeber 2024 Presiden Prabowo meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih melakukan efisiensi, pada sidang tersebut Presiden Prabowo mengatakan

bahwasanya anggaran efisiensi tersebut bisa dijamin menjadi jaminan jika langkah yang dilakukan benar (Setuningsih,2024).

Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah berdampak pada pengelolaan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Indonesia. Pada tahun 2025, anggaran Kemendikdasmen mengalami penurunan sebesar Rp8,03 triliun, dari total anggaran awal sebesar Rp33,5 triliun menjadi sekitar Rp25,5 triliun. Penurunan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD (Savitri, 2025).

Pada tahun 2025, sejumlah kementerian di Indonesia melaksanakan efisiensi anggaran dengan variasi persentase yang berbeda. Contohnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengurangi anggaran sebesar 35,72% dari pagu Rp6,4 triliun, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk melakukan efisiensi hingga Rp81 triliun dari pagu Rp110 triliun. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan melakukan pemotongan anggaran sebesar 57,46% dari total pagu Rp4,79 triliun. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana untuk memangkas anggaran hingga 58,17% dari pagu Rp7,72 triliun. Jika dibandingkan, efisiensi anggaran di Kemendikdasmen relatif lebih rendah, yaitu sekitar 10-15% dari total anggaran, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penghematan, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang dijaga agar tidak mengalami pemotongan yang signifikan. Hal ini penting mengingat peran strategis Kemendikdasmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Perbedaan persentase efisiensi ini juga mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjaga kesinambungan program pendidikan, meskipun di tengah tekanan penghematan anggaran yang cukup besar di kementerian lainnya (Puspita & Silaban, 2025).

Pemberlakuan program efisiensi anggaran ini dilakukan pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai wujud komitmen dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Sejak tahun 2009, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan ini telah

dilaksanakan, mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menyediakan dana yang memadai untuk sektor pendidikan. Meskipun saat ini pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran dalam APBN untuk menghadapi berbagai tantangan fiskal, prioritas alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga agar tidak mengalami pemotongan yang signifikan. Selain itu, pemerintah berupaya memastikan penggunaan anggaran pendidikan secara optimal dan tepat sasaran, dengan fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, serta mendukung pencapaian target pembangunan sumber daya manusia, seperti visi Indonesia Emas 2045. Dalam upaya efisiensi anggaran, pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana pendidikan untuk mencegah pemborosan, sehingga anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Hal ini sangat penting agar meskipun ada tekanan untuk mengurangi belanja negara, sektor pendidikan tetap mendapatkan dukungan yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif (Saptati, 2025).

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, alokasi untuk sektor pendidikan mencapai Rp724,3 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dari jumlah tersebut, Rp297,2 triliun dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat untuk berbagai program strategis, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjangkau 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 477,7 ribu guru non-PNS. Selain itu, Rp347,09 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan tujuan agar pendidikan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Alokasi anggaran yang signifikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, mencakup akses pendidikan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, tantangan dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tetap menjadi perhatian utama agar dana yang dialokasikan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional (Saptati, 2025).

Kemendikdasmen merupakan instansi yang berada dibawah pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemendikdasmen adalah pecahan dari Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau bisa disebut dengan Kemendikbudristek. Saat ini Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki Menteri yang bernama Abdul Mu'ti yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 dan tergabung dalam Kabinet Merah Putih periode 2024 - 2029. Tugas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah seperti menyelenggarakan perumusan pendidikan di jenjang PAUD sampai dengan pendidikan menengah, memfasilitasi pendidik dan tenaga didik, menyelenggarakan pendidikan dini, dasar, menengah, vokasi, dan pendidikan tinggi, mengelola sistem perbukuan, melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan di daerah, dan yang terakhir mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian.

Program – program Kemendikdasmen juga terkena dampak dari kebijakan efisiensi ini, termasuk program bantuan sertifikasi siswa SMK. Dari dampak efisiensi yang di terapkan pada era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ada dampak yang di timbulkan oleh kebijakan efisiensi di Kemendikdasemen. Di bawah kepemimpinan Abdul Mu'ti, Kemendikdasmen tetap mengutamakan program-program prioritas untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan kelengkapan pendukung belajar para siswa sekolah di daerah.

Pendidikan bagi sebuah negara sangatlah penting. Pendidikan adalah pondasi sumber daya manusia di sebuah negara. Di Indonesia program wajib belajar 12 Tahun di Indonesia telah resmi dilaksanakan sejak bulan Juni 2015 sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan mutu dan distribusi pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas atau yang setara. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan selama 12 tahun secara penuh, sehingga partisipasi dalam pendidikan meningkat, kesenjangan antar wilayah berkurang, dan kolaborasi dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia menjadi lebih kokoh. Dengan adanya efisiensi anggaran, pendidikan di Indonesia akan mengalami penurunan dari segi kualitas

karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk biaya peningkatan sistem pengajaran dan pembelajaran menjadi berkurang. Pemotongan ini dapat berdampak pada lambatnya perkembangan sistem pembelajaran di Indonesia (Bashori, Aprima, 2019).

Kondisi pendidikan di Indonesia sendiri terjadi beberapa perubahan seperti terjadi sejumlah perubahan kebijakan dalam sektor pendidikan di Indonesia, di mana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan berbagai kebijakan dan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan. Salah satu fokus utama adalah penguatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, disiplin, dan sikap sosial yang baik. Selain itu, program wajib belajar selama 13 tahun diperkuat untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan hingga tingkat menengah atas, sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan dan renovasi sekolah, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Selanjutnya, Rapor Pendidikan 2025 menampilkan capaian hasil pembelajaran yang diukur secara objektif melalui Asesmen Nasional, yang mencakup Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam capaian kompetensi minimum siswa, khususnya dalam bidang literasi dan numerasi. Pada tahun 2022, tingkat literasi siswa mencapai 59,49%, dan diproyeksikan meningkat menjadi 70,03% pada tahun 2024. Sementara itu, capaian numerasi juga mengalami peningkatan dari 45,24% pada 2022 menjadi 67,94% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pendidikan yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat dasar dan menengah (Prastanto, 2025).

Pemotongan anggaran pendidikan tanpa adanya analisis yang mendalam dapat mengakibatkan menurunnya investasi pada infrastruktur sekolah yang menyebabkan kurangnya alat-alat yang mendukung. Hal ini dapat menyebabkan

lingkungan belajar yang kurang kondusif dan terhambatnya proses belajar dan mengajar. Selain itu, pemotongan anggaran dapat menyebabkan ketimpangan dalam hal pengajaran dan pembelajaran antardaerah di Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi subjek utama dalam penelitian karena perannya yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Pendidikan dasar dan menengah berfungsi sebagai landasan utama dalam menciptakan generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan, termasuk dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul. Namun, fenomena yang ada menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan, khususnya di Kemendikdasmen, sering kali mengalami pemotongan atau efisiensi yang cukup signifikan dibandingkan dengan kementerian lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan dalam kebijakan anggaran nasional. Pemotongan anggaran yang terlalu besar dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan, seperti penyediaan fasilitas, pelatihan guru, dan program-program pembelajaran inovatif yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan siswa.

Kemendikdasmen merupakan salah satu Kementerian baru yang didirikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo dan merupakan pecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Maju. Pendirian ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi kementerian negara. Peraturan ini melahirkan sejumlah kementerian baru dari semula 34 Kementerian menjadi 48 kelompok Kementerian. Kementerian ini dibagi kedalam : Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian kelompok II dan Kementerian kelompok III di mana Kemendikdasmen masuk ke dalam Kelompok II (Perpres 140/2024: Organisasi Kementerian Negara, 2024)

Peneliti memutuskan untuk meneliti pemberitaan tentang efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) karena kementerian ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Isu efisiensi anggaran di Kemendikdasmen

menjadi relevan mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan serta dampaknya yang langsung terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, pemberitaan mengenai efisiensi anggaran di kementerian ini cukup kontroversial karena efisiensi anggaran pada Kemendikdasmen dapat mengurangi jumlah dana PIP, dana pembangunan sekolah, serta anggaran gaji guru sehingga menarik untuk dianalisis bagaimana isu tersebut disampaikan. Fokus pada Kemendikdasmen karena sektor pendidikan merupakan sektor penting untuk menjaga mutu layanan pendidikan. Kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan di kementerian ini berpotensi mempengaruhi kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia (Marwah & Ernis, 2025).

Peneliti ingin menganalisis *framing* mengenai efisiensi anggaran pada Kemendikdasmen dari dua situs media *daring*, yaitu Kompas.com dan Detik.com. Setiap media memiliki pbingkaiannya masing masing. Kompas.com adalah portal media daring di Indonesia yang menawarkan berbagai konten berita terkini di Indonesia. Pada awalnya Kompas.com bernama Kompas daring pada tahun 1995. Kemudian, pada tahun 1998 Kompas daring berganti nama menjadi Kompas.com sehingga menjadi portal berita terpercaya di Indonesia. Kemudian pada 2008, Kompas.com melakukan perubahan yang signifikan Kompas.com menghadirkan konsep yang baru dan lebih serbaguna dan ramah iklan. Perubahan ini menyebabkan peningkatan pengunjung Kompas.com di setiap tahunnya (Kompas.com, 2025).

Peneliti memilih Kompas.com sebagai salah satu sumber media karena beberapa alasan yang signifikan. Kompas.com adalah salah satu portal media daring terbesar dan paling terpercaya di Indonesia, dengan sejarah yang panjang sejak tahun 1995. Perkembangan yang signifikan pada tahun 2008 menjadikan Kompas.com lebih serbaguna dan mudah diakses, sehingga mampu menarik jumlah pengunjung yang besar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa konten berita yang disajikan memiliki jangkauan yang luas dan berpengaruh terhadap opini publik. Selain itu, dalam hal pemberitaan, Kompas.com dikenal mengutamakan aspek legalitas, fakta, dan objektivitas, dengan penyajian informasi yang netral dan seimbang tanpa memihak kepentingan tertentu (Kompas.com, 2025).

Kompas.com dikenal karena pendekatan pemberitaannya yang mendalam, analitis, dan berfokus pada penyajian fakta secara menyeluruh. Media ini cenderung menyajikan berita dengan analisis yang lebih terperinci, sehingga sangat sesuai bagi pembaca yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan kritis mengenai isu-isu kebijakan publik, seperti efisiensi anggaran pendidikan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana aspek legalitas, objektivitas, dan keseimbangan informasi disajikan secara sistematis oleh media arus utama yang terpercaya.

Selanjutnya, peneliti memilih Detik.com untuk menganalisis *framing* pemotongan anggaran pada Kemendikdasmen. Detik.com sendiri berdiri pada tahun 1998 yang didirikan dengan tujuan untuk menghadirkan berita terkini. Lalu pada tahun 2011, Detik.com diakuisisi oleh Transmedia di bawah grup perusahaan CT Corp. Dengan proses akuisisi ini, Detik.com tetap bertahan sebagai media yang netral. Dengan ini Detik.com melasat sebagai media daring dengan jutaan pengakses di setiap harinya. Lalu pada tahun 2019, Detik.com terus berinovasi dan melakukan transformasi. PT Agranet Multicitra Sibercom yang sebelumnya menjadi nama perusahaan naungan Detik.com berubah menjadi PT Trans Digital Media. Perubahan nama perusahaan tersebut menjadikan Detik.com bukan sebagai media digital satu-satunya yang dimiliki oleh PT Trans Digital Media, namun berkembang menjadi keluarga jaringan media bernama Detik Network. (detik.com, 2021).

Di sisi lain, Detik.com menonjol sebagai portal media daring yang mengedepankan penyampaian berita yang cepat, ringkas, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Audiens yang menjadi target Detik.com lebih beragam dibandingkan dengan Kompas.com, sehingga bahasa dan struktur pemberitaannya dirancang agar dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan latar belakang khusus. Kecepatan dalam penyajian berita di Detik.com mencerminkan dinamika konsumsi informasi digital saat ini yang mengutamakan kecepatan pembaruan dan kemudahan pemahaman. Oleh karena itu, analisis *framing* pada Detik.com akan memberikan wawasan tentang bagaimana isu efisiensi anggaran disampaikan secara singkat namun tetap informatif kepada publik yang lebih luas.

Detik.com memiliki jumlah pengunjung yang sangat tinggi setiap harinya, menjadikannya salah satu media daring paling terkenal dan berpengaruh di Indonesia. Selain itu, transformasi perusahaan pada tahun 2019 menjadi PT Trans Digital Media dan perkembangan jaringan media yang dikenal sebagai Detik Network menunjukkan bahwa Detik.com terus berinovasi dan melakukan ekspansi untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui berbagai platform digital. Dengan karakteristik tersebut, analisis framing terhadap pemberitaan mengenai efisiensi anggaran Kemendikdasmen di Detik.com memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana isu tersebut dibingkai oleh salah satu media daring terbesar dan paling terpercaya di Indonesia. Detik.com dikenal dengan media *daring* yang cenderung subjektif dalam pemberitaan dan mengangkat hal yang kontroversial dari sebuah berita (detik.com, 2021).

Kompas.com dan Detik.com adalah dua platform berita daring yang paling berpengaruh di Indonesia, dengan karakteristik yang saling melengkapi. Kompas.com, sebagai lanjutan dari surat kabar Kompas yang telah lama dikenal kredibel, menawarkan berita yang mendetail dan analitis, sehingga mendukung pemahaman yang lebih dalam terhadap isu-isu kebijakan publik. Di sisi lain, Detik.com, yang didirikan pada tahun 1998, menekankan pada kecepatan penyampaian berita dan gaya bahasa yang mudah dipahami, menjadikannya pilihan utama bagi pembaca yang menginginkan informasi yang cepat dan langsung.

Peneliti memilih Detik.com dan Kompas.com sebagai objek penelitian karena kedua media ini merupakan portal berita daring terkemuka di Indonesia yang juga memberitakan isu-isu nasional penting, termasuk laporan mengenai Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kompas.com dikenal dengan pendekatan pemberitaannya yang mendalam dan analitis, memberikan pembaca perspektif yang komprehensif dan berbasis fakta. Sementara itu, Detik.com memiliki keunggulan dalam penyampaian berita yang cepat, ringkas, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih besar dan beragam. Dengan memilih kedua media ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana framing atau pembingkaiian berita tentang efisiensi anggaran tersebut disampaikan melalui sudut pandang yang berbeda—antara pemberitaan yang mendalam dan yang cepat. Hal ini relevan terkait dengan topik penelitian karena

membantu memahami bagaimana informasi mengenai kebijakan anggaran pendidikan disebarluaskan kepada publik dan bagaimana media mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap isu tersebut.

Urgensi pemilihan media Detik.com dan Kompas.com dalam penelitian ini sangat penting karena kedua portal berita daring tersebut memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini publik serta menyebarkan informasi mengenai kebijakan nasional di Indonesia. Detik.com dikenal dengan gaya pemberitaan yang cepat, ringkas, dan mudah dipahami, sehingga sangat efektif dalam menjangkau audiens yang luas dan beragam. Dalam konteks pemberitaan mengenai efisiensi anggaran, Detik.com cenderung menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan fokus pada fakta-fakta penting yang dapat langsung dipahami oleh masyarakat umum.

Di sisi lain, Kompas.com memiliki gaya pemberitaan yang lebih mendalam dan analitis, dengan penyajian yang komprehensif dan berimbang, sehingga lebih banyak menekankan konteks serta latar belakang kebijakan tersebut. Gaya pemberitaan Kompas.com dalam isu efisiensi anggaran biasanya menyajikan kajian yang lebih rinci, termasuk analisis dampak kebijakan serta pandangan dari para ahli atau pejabat terkait. Dengan memilih kedua media yang memiliki karakter berbeda ini, penelitian dapat menganalisis framing pemberitaan dari dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu antara kecepatan dan kemudahan akses informasi serta kedalaman dan analisis kritis—yang pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana masyarakat menerima dan memahami isu efisiensi anggaran Kemendikdasmen.

No.	Media	Jumlah Berita
1.	Kompas.com	188
2.	Detik.com	118
3.	IDNTimes	90
4.	Liputan6.com	98
5.	Tempo.co.	107

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Berita

Peneliti membandingkan dengan media konvensional lain untuk melihat jumlah pemberitaan mengenai efisiensi anggaran terutama pada Kemendikdasmen, peneliti menemukan bahwa Kompas.com memiliki berita terbanyak dengan jumlah 188 pemberitaan kemudian Detik.com memiliki 118 berita, IDN Times dengan 90 berita, Liputan6 berjumlah 98 berita, dan pada Tempo.co memiliki 107 berita. Kompas.com dan Detik.com dipilih oleh peneliti karena keduanya memiliki jumlah berita yang lebih banyak dibandingkan dengan media lain yang memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

Kompas.com memiliki 188 berita yang memberitakan Kementerian Dasar dan Menengah. Detik.com memiliki 118 berita yang berkaitan dengan Kementerian Dasar dan Menengah. Peneliti memiliki rentang periode Oktober 2024 – Februari 2025 karena menilai dengan 100 hari kerja yang menjadi momentum penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Dengan total berita Kompas.com 21 berita dan Detik.com 30 berita dengan rincian pada bulan Oktober 2024 Kompas.com tidak memiliki berita tentang efisiensi anggaran Kemendikdasmen sedangkan Detik.com memiliki 1 berita yang membahas tentang efisiensi anggaran Kemendikdasmen, lalu pada bulan November 2024 Kompas.com dan Detik.com sama-sama memiliki 3 berita yang membahas efisiensi anggaran Kemendikdasmen, pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025 Kompas.com tidak memiliki berita efisiensi anggaran Kemendikdasmen sedangkan Detik.com memiliki 2 berita pada bulan Desember 2024 dan 2 berita pada bulan Januari 2025. Pada bulan Februari 2025 Kompas.com memiliki 18 berita yang membahas efisiensi anggaran Kemendikdasmen sedangkan Detik.com memiliki 22 berita yang membahas efisiensi anggaran Kemendikdasmen.

Kompas.com dan Detik.com merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media diartikan secara umum sebagai berita yang dapat diakses melalui internet untuk membuka situs yang di dalamnya terdapat informasi berupa teks, gambar, video dan suara. Media baru atau media *daring* adalah tempat untuk menyebarkan informasi yang menggunakan teknologi digital internet sebagai tempat utamanya. Media ini tidak hanya untuk tempat penyampaian pesan saja melainkan dapat memungkinkan berkomunikasi langsung antara pengirim pesan dan penerima pesan bahwa dengan kemajuan

zaman dan teknologi pesat semakin meningkatnya pengaruh penggunaan internet atau media daring sebagai tempat untuk memperoleh informasi (lin, et al, 2023). Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa media *daring* atau media baru telah merubah cara penyampaian pesan dan penerimaan informasi.

Pada penelitian, peneliti menggunakan model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Metode ini digunakan untuk menganalisis berita berdasarkan apa yang ada di balik wacana dari media massa dan melihat penulisan berita dari empat struktur yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi rujukan untuk penelitian.

Pada penelitian pertama, penelitian oleh Syehan Hakim pada tahun 2024 yang berjudul “Pengemasan Berita Debat Kandidat Capres dan Cawapres Pada Media Sosial Analisis Isi Kualitatif Berita Debat Pilpres 2024 Di Instagram @Kompas.com dan @Idntimes” Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengemasan berita debat kandidat capres dan cawapres pada akun Instagram @Kompas.com dan @Idntimes. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data ini melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pemberitaan debat pilpres 2024 lebih yang dominan adalah pemberitaan *straight news*, yang terlihat di dalam unggahan pemberitaan debat pilpres 2024 pada akun media sosial Instagram kedua media tersebut. Pada pengemasan berita tersebut, tidak terlihat unsur pendapat/opini dari pihak penulis. Dari Nada pemberitaan @Kompas.com dan @Idntimes menunjukkan keduanya lebih didominasi dengan nada Nada netral.

Penelitian kedua yang menjadi rujukan ditulis oleh Falah Aliya dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan Setelah Dideklarasikan Sebagai Calon Presiden Di Kompasiana.com”. Objek dari penelitian tersebut adalah menganalisis *framing* pemberitaan Anies Baswedan setelah dideklarasikan sebagai calon presiden di kompasiana.com menurut Zhongdang dan Gerald M. Kosicki. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan tersebut cenderung mengungkap potensi kegagalan Anies Baswedan serta rintangan yang harus dilewati Anies karena Anies tidak dapat dukungan dari presiden Jokowi.

Selain itu, penulis juga menyampaikan secara detail bahwa Anies memiliki strategi politik yang rendah dan peran Anies memiliki kekuatan dalam menentukan cawapres.

Penelitian ketiga yang menjadi salah satu referensi merupakan hasil pemikiran dari Ahmad Fajar Rizki dengan judul “Pembingkai Pemberitaan Resesi Ekonomi Di Indonesia Oleh Media Daring IDXChannel.com”. Tujuan penelitian Ahmad adalah untuk mengetahui cara IDXChannel.com membingkai berita resesi ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Ahmad menunjukkan bahwa IDXChannel.com melakukan pembingkai yang bersifat *ambivalen* karena mendukung sekaligus mengkritik pemerintah.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa para peneliti terdahulu telah melakukan penelitian *framing* dengan baik dan melakukan perbandingan pembingkai dari dua media. Peneliti akan melakukan analisis *framing* dalam penelitian pembingkai pemberitaan efisiensi anggaran pada Kemendikdasmen pada situs media *daring*, yakni Kompas.com dan Detik.com dalam periode Oktober 2024 hingga Februari 2025. Penelitian akan menggunakan metode analisis *framing* oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosciuk yang merinci empat struktur, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pembingkai Pemberitaan Efisiensi Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Situs Media daring pada situs media *Kompas.com* dan *detik.com* periode Oktober 2024-Februari 2025 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui cara media Kompas.com dan Detik.com dalam melakukan pembingkai berita tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Situs Media daring kepada khalayak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian disusun dengan harapan dapat menjadi referensi dan manfaat untuk penelitian – penelitian selanjutnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademik

Studi ini memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan kajian literatur mengenai framing dalam pemberitaan media daring, terutama yang berkaitan dengan isu efisiensi anggaran pemerintah. Temuan dari penelitian dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang berminat untuk mengeksplorasi cara media membingkai isu sosial dan kebijakan publik. Di samping itu, dengan hasil diharapkan dapat juga memperluas pemahaman tentang model framing Pan dan Kosicki dalam konteks media daring, sehingga dapat dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut di bidang komunikasi dan jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi redaksi media dalam memahami perspektif yang berbeda terkait cara mereka membingkai isu efisiensi anggaran Kemendikdasmen. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang framing, redaksi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan agar lebih objektif dan seimbang, sehingga dapat membangun kepercayaan di kalangan pembaca. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat memberikan saran bagi redaksi untuk lebih berhati-hati dalam memilih sudut pandang dan bahasa yang digunakan, guna menghindari kesalahpahaman atau bias yang tidak diinginkan.